Menyusun Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Basri [*1], Siradjuddin [*2] Alwan Suban*[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
e-mail: basrimalabi@gmail.com[1], siradjuddin@uin-alauddin.ac.id[2], alwan.suban@uin-alauddin.ac.id[3]

Submit : 14 Jan. 2025	Review : 23 Mar. 2024	Received : 28 Mei 2025

DOI : *https://doi.org/10.47625/fusshilat.v1i2.939*

Abstract. The preparation of a work program for educational budget implementation is a strategic step in managing financial resources to achieve educational goals. Effective budget management plays a crucial role in ensuring the availability of quality educational facilities and services. This article discusses seven key aspects of educational budget preparation, namely routine budgets, development budgets, budget determination, expedited work completion through cash programs, program cost analysis, and the preparation of unit costs for routine and development budgets. The routine budget covers daily operational needs, such as salary payments, stationery procurement, and facility maintenance, which are prepared based on an inventory of needs and priority setting. Meanwhile, the development budget focuses on long-term projects, such as renovations and new facility procurements. Budget determination is carried out by referring to data-based educational needs and involving stakeholders to ensure transparency. In addition, a cash program strategy is implemented to accelerate work completion through timely fund management. Program cost analysis helps evaluate the effectiveness of fund allocation by comparing benefits and costs and identifying potential inefficiencies. The preparation of unit costs, both for routine and development budgets, considers market price standards and the specific needs of each component. Each stage is designed to ensure transparent, efficient, and targeted budget management. With thorough planning and active involvement from various parties, the educational budget can be allocated optimally to create a conducive learning environment. This article is expected to serve as a practical guide for policymakers and educational practitioners in enhancing accountability and financial management quality in the education sector, thereby supporting the sustainable achievement of national educational goals.

Keywords. Educational Budget, Budget Implementation, Financial Management

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi aspek yang sangat krusial. Meurut UU No 20 tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".[1] Anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Membiayai manajemen yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan lembaga

[1] Desi Pristiwanti et al., Pengertian pendidikan, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), hal. 11–15.

untuk mempromosikan atau meningkatkan kualitas.[2] Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan kemajuan pendidikannya.[3] Sementara itu, anggaran pembangunan digunakan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian alat teknologi pendidikan, dan program inovasi pembelajaran. Penyusunan kedua jenis anggaran ini membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penentuan skala prioritas dan estimasi kebutuhan berdasarkan data yang valid.[4]

Pengelolaan anggaran pendidikan juga dituntut untuk mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dalam prosesnya, analisis biaya program menjadi salah satu langkah penting yang memungkinkan manajer pendidikan untuk mengukur efektivitas alokasi dana terhadap hasil yang dicapai implementasi kebijakan percepatan pencapaian 8 SNP memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah, meningkatnya mutu lulusan sekolah, dan meningkatnya daya saing bangsa di tingkat global.

Sedangkan tantangannya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya infrastruktur yang memadai, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.[5] Cash program, yaitu perencanaan pencairan dana secara efisien, diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pendidikan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menunda pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan biaya satuan pada setiap komponen anggaran, baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunan, menjadi langkah penting untuk memberikan detail penggunaan dana dan meminimalkan risiko pemborosan.

Dengan kompleksitas pengelolaan anggaran pendidikan, penyusunan program kerja pelaksanaan anggaran membutuhkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, komite pendidikan, dan pemerintah, dapat membantu menciptakan rencana yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan panduan langkah-langkah penyusunan program kerja anggaran pendidikan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjawab tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam menyusun program kerja pelaksanaan anggaran pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penyusunan anggaran pendidikan yang meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, analisis biaya program, hingga penyusunan biaya satuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan, dan laporan manajemen keuangan di lembaga pendidikan. Literatur yang dianalisis mencakup

[2] Achmad AnwarAbidin, "Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya)," *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3.01 (2017), hal. 87–99.

[3] Ahmad Arifi, "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan," *Jurnal PAI vol V no 1 2008*, 2008.

[4] A. Marjuni, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik," *Al asma : Journal of Islamic Education*, 2.2 (2020), hal. 210, doi:10.24252/asma.v2i2.16915.

[5] Ronald Hervin Haloho dan Wildansyah Lubis, "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan: Analisis Dampak Dan Tantangan," *Jurnal Eksplorasi Pendidikan*, 7.5 (2024).

referensi dari tingkat nasional hingga internasional guna memperoleh perspektif yang holistik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan panduan yang aplikatif dalam menyusun program kerja pelaksanaan anggaran pendidikan yang transparan, efisien, dan sesuai kebutuhan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan wawasan praktis bagi para pengelola lembaga pendidikan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari studi literatur, penyusunan program kerja pelaksanaan anggaran pendidikan dapat dirumuskan dalam beberapa langkah strategis. Setiap aspek yang dibahas memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut adalah hasil penelitian yang dirangkum berdasarkan tujuh aspek utama:

Menyusun Anggaran Rutin Pendidikan

Anggaran rutin pendidikan mencakup biaya operasional harian yang harus dikelola secara berkelanjutan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa hambatan. Biaya ini meliputi pembayaran gaji guru dan staf, pembelian alat tulis kantor (ATK), perawatan fasilitas sekolah, serta kebutuhan operasional lainnya.

Penyusunan anggaran rutin yang baik memerlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (a) Melakukan identifikasi kebutuhan operasional yang harus dipenuhi dalam periode tertentu, baik bulanan maupun tahunan. Identifikasi ini mencakup seluruh kebutuhan esensial seperti jumlah gaji yang harus dibayarkan, jumlah alat tulis yang diperlukan untuk mendukung administrasi, hingga biaya pemeliharaan fasilitas seperti perbaikan bangku, ruang kelas, dan perangkat IT. Data yang diperoleh dari identifikasi ini menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran yang realistis. dengan mengikuti langkah-langkah ini, penyusunan anggaran rutin pendidikan dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi yang konsisten memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan atau pengeluaran yang tidak perlu.

Menyusun Anggaran Pembangunan Pendidikan

Anggaran adalah rencana keuangan berkala yang mencakup kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran adalah proses pengoperasian rencana dalam bentuk kualifikasi, yang biasanya dalam bentuk moneter, untuk jangka waktu tertentu.[6] partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.[7] langkah-langkah menyusun anggaran pembangunan pendidikan difokuskan pada kebutuhan jangka panjang yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan belajar, seperti renovasi fasilitas, pembangunan gedung baru, atau penyediaan teknologi pembelajaran modern. Penyusunan anggaran pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang agar proyek dapat berjalan dengan efisien dan memenuhi kebutuhan pendidikan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi: (a) Menyusun proposal proyek yang rinci dan terukur. Proposal ini mencakup tujuan proyek, identifikasi kebutuhan, rincian kegiatan, serta estimasi biaya yang diperlukan. Sebagai contoh, jika tujuan proyek adalah renovasi ruang kelas, proposal harus menjelaskan kondisi ruang kelas saat ini, kebutuhan

---

[6] William Lius et al., "Analisis Penyusunan Anggaran Pada CV. Buana Raya Medan," *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3.1 (2019).

[7] Gita Pramudya Saraswati dan Mimin Nur Aisyah, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan job relevant information sebagai variabel moderating (Studi pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta)," *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4.2 (2015), hal. 136–47.

renovasi, dan biaya bahan serta tenaga kerja. Perencanaan ini menjadi dokumen utama dalam pengajuan anggaran dan alat evaluasi kemajuan proyek. (b) Agar anggaran pembangunan relevan dan didukung penuh, perlu dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, seperti komite sekolah, pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan, menyelaraskan kebutuhan dengan harapan semua pihak, serta memastikan bahwa proyek mendapat dukungan dana dan moral. Pendekatan ini juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama atas keberhasilan proyek. (c) Timeline proyek adalah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dirancang agar proyek dapat selesai tepat waktu. Penyusunan timeline mencakup pembagian tahap pekerjaan, seperti pembelian bahan, pengerjaan fisik, dan penyelesaian akhir. Penjadwalan ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan hambatan, seperti cuaca atau keterlambatan pengiriman material, agar proyek dapat diantisipasi dengan baik.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penyusunan anggaran pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara efisien dan terarah. Keberhasilan proyek pembangunan tidak hanya bergantung pada dana yang tersedia, tetapi juga pada perencanaan, kolaborasi, dan pengelolaan waktu yang baik. Proses ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas pendidikan dan kenyamanan lingkungan belajar.

Menetapkan Besar Anggaran Pendidikan

Penetapan besar anggaran pendidikan adalah proses penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat mendukung kebutuhan operasional dan Pembangunan secara optimal. Pemerintah wajib membiayai pendidikan setiap warga negaranya dengan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Dengan demikian diharapkan setiap warga negara dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.8 Langkah ini memerlukan perencanaan yang teliti berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk analisis kebutuhan sekolah dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dibutuhkan manajemen pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan. Sumber sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun sumber dana yang berasal dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.[9] Dalam organisasi sector public termasuk pemerintahan, anggaran merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik.[10]

Melalui langkah-langkah tersebut, penetapan besar anggaran pendidikan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan serta tujuan pendidikan. Hal ini memastikan bahwa alokasi dana mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Mempercepat Waktu Penyelesaian Pekerjaan (*Cash Programme*)

Mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan melalui cash programme merupakan

---

[8] Sri Citra Diah Nandani, Bambang Setyadin, dan Ahmad Nurabadi, "Analisis alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah," *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan (JAMP)*, 1.1 (2018), hal. 22–28.

[9] Mujayaroh Mujayaroh dan Rohmat Rohmat, "Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan di lembaga pendidikan," *Arfannur*, 1.1 (2020), hal. 41–54.

[10] Taufik Kurrohman, "Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur," *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5.1 (2013).

langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan proyek pendidikan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala keuangan. Cash programme adalah pengelolaan dana yang dirancang secara terorganisasi, mulai dari pencairan hingga penggunaannya, sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu.

Langkah-langkah utama dalam implementasi cash programme meliputi: (a) Penyusunan jadwal pencairan dana. Pencairan dana yang terencana menjadi kunci utama keberhasilan cash program. Jadwal pencairan dana harus disusun berdasarkan kebutuhan pekerjaan, seperti pembelian bahan, pembayaran upah tenaga kerja, atau biaya operasional lainnya. Dengan jadwal ini, setiap pihak yang terlibat dalam proyek dapat memperoleh dana yang dibutuhkan pada waktu yang tepat, sehingga pekerjaan tidak tertunda. (b) Setelah dana dicairkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran. Pengelola proyek harus memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tanpa ada penyimpangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan harian atau mingguan dari pelaksana proyek, disertai bukti pengeluaran seperti kwitansi atau faktur pembelian. (c) Evaluasi berkala dilakukan untuk meninjau progres pekerjaan, baik dari segi penggunaan dana maupun pencapaian target proyek. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi deviasi dari rencana awal, seperti penundaan pekerjaan atau pembengkakan biaya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian pada jadwal kerja atau alokasi anggaran jika diperlukan.

Dengan penerapan cash programme yang terorganisasi, penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas hasil. Penyusunan jadwal pencairan dana, pengawasan ketat, dan evaluasi berkala memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan berjalan lancar dan efisien. Strategi ini sangat relevan dalam pengelolaan proyek pendidikan yang membutuhkan penggunaan dana secara tepat waktu dan akuntabel.

Menganalisis Biaya Program

Analisis biaya program merupakan bagian penting dalam mengelola anggaran pendidikan, karena proses ini membantu mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang telah dialokasikan. Dengan menganalisis biaya program, pengelola anggaran dapat memastikan bahwa dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal.

Langkah-langkah dalam menganalisis biaya program meliputi: (a) Membandingkan manfaat yang diperoleh dari program dengan biaya yang telah dikeluarkan. Ini bertujuan untuk menilai apakah dana yang dialokasikan memberikan dampak yang sepadan terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Misalnya, jika dana dialokasikan untuk pengadaan alat pembelajaran baru, maka manfaatnya harus terukur, seperti peningkatan kualitas pembelajaran atau peningkatan hasil ujian siswa. Jika biaya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima, maka analisis ini akan menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran atau perbaikan dalam perencanaan program. (b) Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen-komponen yang cenderung mengalami over-budget atau pemborosan. Ini bisa berupa pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pemilihan vendor dengan harga yang lebih tinggi dari standar pasar, atau pemborosan waktu yang menyebabkan penundaan dalam penggunaan anggaran. Proses ini membutuhkan analisis mendalam terhadap setiap elemen dalam anggaran untuk mencari peluang penghematan. Solusi efisiensi yang ditemukan, seperti mengganti metode pengadaan atau renegosiasi kontrak, dapat diimplementasikan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal. (c) Setelah melakukan analisis biaya, hasilnya harus disusun dalam bentuk laporan yang transparan dan terstruktur. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi untuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai alat

evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk menilai keberhasilan penggunaan anggaran. Laporan yang jelas dan akurat akan memudahkan dalam mengambil keputusan untuk program-program berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berguna untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.

Melalui analisis biaya program, pengelola anggaran dapat mengidentifikasi apakah penggunaan dana memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses ini juga memungkinkan untuk menemukan potensi pemborosan yang dapat diminimalkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang. Dengan pelaporan hasil analisis yang baik, pihak yang bertanggung jawab dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Menyusun Biaya Satuan pada Anggaran Rutin

Biaya satuan pada anggaran rutin merujuk pada rincian kebutuhan operasional yang dihitung berdasarkan unit biaya, yang memungkinkan pengelolaan anggaran secara lebih terperinci dan akurat. Penyusunan biaya satuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap komponen pengeluaran dalam anggaran rutin dihitung dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang sesungguhnya.

Proses penyusunan biaya satuan meliputi langkah-langkah berikut: (a) melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan rutin yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup berbagai komponen operasional yang digunakan setiap hari, seperti kertas, tinta, listrik, dan bahan habis pakai lainnya. Melalui inventarisasi ini, pengelola anggaran dapat menghitung jumlah kebutuhan berdasarkan periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Dengan cara ini, anggaran dapat disusun secara lebih efisien dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. (b) Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan harga satuan untuk setiap komponen biaya. Penetapan harga satuan ini harus mengacu pada standar harga pasar terkini agar alokasi anggaran lebih realistis. Sebagai contoh, harga kertas, tinta printer, atau tarif listrik dapat berbeda-beda, tergantung pada pemasok atau kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelola anggaran perlu melakukan riset harga pasar dan memperhitungkan harga yang wajar dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. (c) Setelah harga satuan ditetapkan, biaya harus dikelompokkan sesuai dengan alokasinya. Pengelompokan ini bisa dilakukan berdasarkan unit yang lebih kecil, seperti biaya per siswa, per kelas, atau per kegiatan. Misalnya, biaya ATK per siswa atau biaya pemeliharaan fasilitas per kelas. Dengan cara ini, anggaran rutin dapat dikelola secara lebih spesifik, memudahkan pelaporan, serta memastikan pengeluaran hanya terjadi sesuai dengan kebutuhan yang relevan.

Dengan menyusun biaya satuan pada anggaran rutin, pengelola anggaran dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan pengeluaran, serta membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan alokasi dana. Proses inventarisasi yang cermat, penetapan harga yang realistis, dan pengelompokkan biaya yang jelas membantu menciptakan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran rutin.

Menyusun Biaya Satuan pada Anggaran Pembangunan

Pada anggaran pembangunan, biaya satuan mencakup komponen-komponen penting seperti kebutuhan material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ialah untuk menghitung biaya-biaya yang diperlukan darisuatu bangunan dan dengan biaya ini bangunan tersebut dapat terwujud

sesuai dengan yangdirencanakan.[11] Penyusunan biaya satuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dari proyek dapat dipenuhi dengan alokasi dana yang realistis dan efisien.

Tahapan dalam penyusunan biaya satuan untuk anggaran pembangunan adalah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi kebutuhan fisik proyek secara detail. Hal ini mencakup bahan-bahan bangunan yang diperlukan, alat berat yang digunakan, serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap tahapan proyek. Misalnya, untuk pembangunan gedung baru, pengelola anggaran perlu menghitung jumlah semen, pasir, batu bata, serta peralatan seperti truk pengangkut atau crane. Begitu juga dengan tenaga kerja, mulai dari tukang batu, tukang kayu, hingga pengawas proyek, yang harus diidentifikasi kebutuhan jumlah dan spesifikasinya. (b) Setelah kebutuhan fisik proyek tercatat dengan baik, langkah berikutnya adalah menyesuaikan dengan harga pasar terkini. Ini berarti melakukan survei harga terhadap bahan bangunan, tenaga kerja, dan peralatan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun realistis dan sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasar.

Harga material, biaya sewa peralatan, dan tarif upah tenaga kerja dapat bervariasi, sehingga perlu dilakukan pengecekan harga dengan vendor atau pemasok yang relevan. Survei harga ini akan membantu mencegah over-budget dan memastikan proyek dapat diselesaikan dengan dana yang tersedia. (c)Langkah terakhir adalah mengelompokkan biaya satuan berdasarkan bagian-bagian proyek yang lebih terperinci. Sebagai contoh, biaya dapat dikelompokkan untuk setiap bagian struktur bangunan, seperti biaya pondasi, biaya pemasangan atap, biaya penyediaan alat multimedia (jika relevan), serta biaya finishing atau pengecatan. Pengelompokkan biaya ini akan memudahkan pemantauan dan evaluasi anggaran di setiap tahapan pembangunan. Selain itu, hal ini juga berguna dalam pengendalian anggaran, sehingga setiap bagian proyek dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terperinci.

Dengan menyusun biaya satuan pada anggaran pembangunan, proyek dapat dijalankan dengan alokasi dana yang tepat untuk setiap kebutuhan. Langkah-langkah seperti mengidentifikasi kebutuhan fisik proyek, menyesuaikan dengan harga pasar, dan mengelompokkan biaya per bagian proyek membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan biaya satuan yang baik juga memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan proyek dan mendukung pengawasan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Penyusunan program kerja pelaksanaan anggaran pendidikan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran di sektor pendidikan. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, penetapan besar anggaran, percepatan penyelesaian pekerjaan melalui cash program, analisis biaya program, hingga penyusunan biaya satuan, memiliki peran yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data, perencanaan yang matang, serta keterlibatan pemangku kepentingan, alokasi dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional sekolah dan program pembangunan. Selain itu, pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga memberikan kepercayaan kepada

[11] Virginia Marcelin Mokolensang, Tisano Tj Arsjad, dan Grace Y Malingkas, "Analisis Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Papua 1 Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua," *Jurnal Sipil Statik*, 9.4 (2022).

seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor, untuk terus mendukung sektor pendidikan.

Melalui penerapan strategi yang telah dibahas, institusi pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan anggaran yang baik, sehingga mendukung tercapainya visi pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Pengelolaan anggaran pendidikan yang terencana dan terukur tidak hanya menjadi fondasi bagi keberhasilan program pendidikan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Secara keseluruhan, implementasi program kerja anggaran pendidikan yang baik berimplikasi pada terciptanya tata kelola keuangan yang lebih profesional dan terintegrasi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan nasional di era globalisasi.

DAFTARPUSTAKA

AnwarAbidin, Achmad, "Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya)," *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3.01 (2017), hal. 87–99

Arifi, Ahmad, "Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan," *Jurnal PAI vol V no 1 2008*, 2008

Haloho, Ronald Hervin, dan Wildansyah Lubis, "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan: Analisis Dampak Dan Tantangan," *Jurnal Eksplorasi Pendidikan*, 7.5 (2024)

Kurrohman, Taufik, "Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur," *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5.1 (2013)

Lius, William, Siska Mediyanti, Rina Friska B R Siahaan, dan Tasik Utama, "Analisis Penyusunan Anggaran Pada CV. Buana Raya Medan," *Jurnal Ilmiah Simantek*, 3.1 (2019)

Marjuni, A., "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik," *Al asma : Journal of Islamic Education*, 2.2 (2020), hal. 210, doi:10.24252/asma.v2i2.16915

Mokolensang, Virginia Marcelin, Tisano Tj Arsjad, dan Grace Y Malingkas, "Analisis Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Papua 1 Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua," *Jurnal Sipil Statik*, 9.4 (2022)

Mujayaroh, Mujayaroh, dan Rohmat Rohmat, "Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan di lembaga pendidikan," *Arfannur*, 1.1 (2020), hal. 41–54

Nandani, Sri Citra Diah, Bambang Setyadin, dan Ahmad Nurabadi, "Analisis alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah," *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan (JAMP)*, 1.1 (2018), hal. 22–28

Pristiwanti, Desi, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, dan Ratna Sari Dewi, "Pengertian pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), hal. 7911–15

Saraswati, Gita Pramudya, dan Mimin Nur Aisyah, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan job relevant information sebagai variabel moderating (Studi pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta)," *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4.2 (2015), hal. 136–47